



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

6. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
9. ADD Minimal selanjutnya disebut ADDM adalah ADD yang berdasarkan asas merata.
10. ADD Proporsional selanjutnya disebut ADDP adalah ADD yang berdasarkan asas adil.
11. ADD Penghargaan yang selanjutnya disebut dengan ADDH adalah ADD yang berdasarkan asas perhitungan kemiskinan.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rencana Penggunaan Dana, selanjutnya disebut RPD adalah rencana penggunaan dana pertahap sesuai dengan persentase yang telah ditentukan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP ADD

Pasal 2

Tujuan dari pemberian ADD adalah digunakan untuk membiayai kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- d. ADD dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB III
ASAS ADD

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Asas yang dipergunakan dalam ADD adalah :
 - a. asas merata;
 - b. asas adil; dan
 - c. asas perhitungan kemiskinan.
- (3) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat dua huruf (a) adalah bagian ADD yang besarnya sama untuk setiap Desa.
- (4) Asas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat dua huruf (b) adalah bagian ADD yang besarnya proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
- (5) Asas perhitungan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat dua huruf (c) adalah bagian dari ADD yang diterima oleh Desa yang perhitungannya didasari atas penurunan kemiskinan di masing masing Desa.

BAB IV
PERHITUNGAN DAN BESARAN ADD

Bagian Kesatu
Perhitungan ADD

Pasal 5

- (1) ADD ditetapkan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Perbekel dan perangkat desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, luas wilayah, kemiskinan dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) ADD untuk penghasilan tetap Perbekel dan perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus

juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (4) Rincian dan besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Besaran ADD

Pasal 6

- (1) Besaran persentase perbandingan antara asas merata, asas adil dan asas perhitungan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 60 % (enam puluh persen) : 35 % (tiga puluh lima persen) : 5 % (lima persen)
- (2) Besaran ADD yang diterima oleh Desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
 $ADD_x = ADDM + ADDP_x + ADDK_x$
 $ADD_x = ADD$ untuk desa x
 $ADDM = ADD$ Minimal yang diterima desa
 $ADDP_x = ADD$ Proposional untuk desa x
 $ADDK_x = ADD$ perhitungan kemiskinan untuk desa x
- (3) Besaran ADDP untuk Desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
 $ADDP_x = BD_x (ADD - \sum ADDM)$
 $BD_x =$ Nilai Bobot Desa untuk desa x
 $ADD =$ Total ADD untuk Kabupaten
 $\sum ADDM =$ Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal
- (4) Besaran ADDKx untuk Desa ditetapkan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dana Merata untuk kemiskinan; dan
 - b. Alokasi Dana Prestasi
- (5) Alokasi Dana Merata Untuk Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan secara merata kepada Desa yang dananya bersumber dari asas perhitungan kemiskinan.

- (6) Alokasi Dana Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung berdasarkan capaian persentase kemiskinan dengan persentase rata rata kemiskinan daerah
- (7) Besaran prosentase perbandingan antara alokasi dana merata untuk kemiskinan dan alokasi dana prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah 50% (lima puluh perseratus) : 50% (lima puluh persen)

Pasal 7

- (1) Nilai bobot desa merupakan nilai desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. Indeks kesulitan geografis; dan
- (2) Setiap Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk (a1) mempunyai Bobot : 0,5
 - b. luas wilayah (a2) mempunyai Bobot : 0,3
 - c. indeks kesulitan geografis (a3) mempunyai bobot : 0,2
- (3) Besaran nilai bobot desa ditetapkan dengan rumus :

$$BDx = a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x$$

BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x
 KV1x, KV2x, KV3x, = Koefisien variabel pertama, kedua, ketiga.
 a1, a2, a3 = Angka bobot masing-masing variabel
- (4) Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
- (5) Data jumlah penduduk, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB V PENGAJUAN DAN PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu Pengajuan ADD

Pasal 8

- (1) Pengajuan berkas permohonan dana ADD dilampiri dengan rencana penggunaan dana dan sebelum diajukan ke Kabupaten terlebih dahulu diteliti ditingkat Kecamatan.
- (2) Hasil penelitian tingkat kecamatan dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagai rekomendasi Camat.

- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji dan dicermati ditingkat kabupaten.
- (4) Hasil kajian ditingkat kabupaten adalah sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam hal pencairan ADD untuk masing-masing Desa.

Bagian Kedua Penyaluran dan Mekanisme

Pasal 9

- (1) penyaluran ADD dapat dilakukan setelah pemerintah desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. APBDesa telah ditetapkan;
 - b. usulan permohonan dana dan rencana penggunaan dana yang disepakati oleh perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa telah mendapat rekomendasi Camat; dan
 - c. laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya.
- (2) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa masing-masing Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam kas Desa.
- (3) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer dari rekening daerah ke rekening Desa.

Pasal 10

Mekanisme penyaluran ADD yaitu :

- a. Pemerintah Desa mengajukan amprah ADD dengan ketentuan:
 1. permohonan penyaluran tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) diajukan paling lambat 31 Mei 2018, dilampiri laporan realisasi penggunaan dana ADD tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2018, rencana penggunaan dana (RPD) tahap I dan foto copy rekening kas Pemerintah Desa;
 2. permohonan penyaluran tahap II sebesar 40 % (lima puluh persen) diajukan paling lambat tanggal 15 November 2018, dengan melampirkan laporan realisasi penggunaan dana ADD tahap sebelumnya dan rencana penggunaan dana (RPD) tahap II; dan
 3. permohonan penyaluran tahap II dapat diajukan ketika penggunaan dana tahap I sudah digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. pengajuan amprah oleh Pemerintah Desa dilakukan setelah mendapat verifikasi/penelitian dari Camat;

- c. verifikasi/penelitian oleh Camat dilakukan untuk melihat kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa (berkas pengajuan dana yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB Desa, dikembalikan ke Desa);
- d. selanjutnya Pemerintah Desa mengirim berkas pengajuan dana pertahap yang telah diverifikasi kepada yang membidangi Pemerintahan Desa guna pencairan dana ADD;
- e. berdasarkan pengajuan dana pertahap dari Pemerintah Desa, satuan kerja teknis mengajukan SPP kepada Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli;
- f. kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintahan Desa di masing-masing bank yang ditunjuk; dan
- g. pencairan dana masing-masing bank dilakukan oleh bendahara dengan bukti diri dan surat kuasa bermeterai Rp 6.000,00 dari perbekel.

Pasal 11

- (1) Bupati berhak menunda penyaluran ADD bagi desa yang tidak memenuhi persyaratan sesuai tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Penundaan penyaluran ADD seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan sampai Pemerintah Desa melengkapi tambahan persyaratan yang ditentukan dan disetujui oleh Bupati.
- (3) Tambahan persyaratan untuk penyaluran ADD bagi desa yang terlambat mengajukan permohonan adalah melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani bersama oleh Perbekel dan BPD yang sedikitnya menyantumkan alasan keterlambatan pengajuan dan kesiapan untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan ADD.

BAB VI SiLPA

Pasal 12

- (1) Sisa dana dari kegiatan yang bersumber dari ADD adalah merupakan SiLPA Desa.
- (2) Apabila dalam satu tahun anggaran terdapat SiLPA dari ADD lebih dari 15% (lima belas persen) maka Bupati berhak melakukan pemotongan ADD yang diperoleh oleh desa sebesar SiLPA ADD.
- (3) Pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PELAKSANAAN KEGIATAN ADD

Pasal 13

- (1) ADD digunakan untuk membiayai kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Dalam membiayai pelaksanaan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Desa wajib mengutamakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh perbekel.
- (4) Perbekel membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk kegiatan pengadaan barang jasa di desa.
- (5) Realisasi fisik kegiatan paling lambat diselesaikan tanggal 31 Desember 2018.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ADD

Pasal 14

- (1) Pengelolaan keuangan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Perbekel selaku kuasa pengelola keuangan desa adalah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dari dana ADD.
- (3) Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dari dana ADD.
- (4) Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana teknis kegiatan.
- (5) Bendaharawan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan ADD wajib berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan setiap selesainya pelaksanaan kegiatan dan diserahkan kepada penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan.

- (7) Penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada perbikel setiap bulan.
- (8) Perbikel melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati melalui Camat setelah selesai pelaksanaan ADD pada tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya yang meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Tim kabupaten dan kecamatan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB X
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	IKG	ADDM	BOBOT (0,5,0,3 dan 0,2) Rp.			35,000,000,000.00	ADDK			5,000,000,000.00	JUMLAH ADD/DESA
							17,500,000,000.00	10,500,000,000.00	7,000,000,000.00		ADDP	ADDKM	ADDKP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	SUSUT	APUAN	4614	4.35	37.70	882,352,941.18	342,348,721.25	91,366,183.14	102,782,915.92	536,497,820.32	36,764,705.88			36,764,705.88	1,455,615,000
2	SUSUT	DEMULIH	4557	4.63	35.45	882,352,941.18	338,119,445.76	97,247,224.82	96,652,503.39	532,019,173.97	36,764,705.88			36,764,705.88	1,451,137,000
3	SUSUT	ABUAN	6980	4.18	35.08	882,352,941.18	517,900,753.00	87,795,550.70	95,646,078.59	701,342,382.29	36,764,705.88	225,000,000	261,764,705.88	1,845,460,000	
4	SUSUT	SUSUT	6284	4.83	36.92	882,352,941.18	466,259,073.33	101,447,968.87	100,666,713.16	668,373,755.36	36,764,705.88			36,764,705.88	1,587,491,000
5	SUSUT	SULAHAN	8398	8.57	26.07	882,352,941.18	623,113,255.55	180,001,882.65	874,205,621.86	36,764,705.88	36,764,705.88			36,764,705.88	1,793,323,000
6	SUSUT	PENGLUMBARAN	3928	4.84	25.80	882,352,941.18	291,449,019.74	101,658,006.07	70,340,853.58	463,447,879.39	36,764,705.88			36,764,705.88	1,382,566,000
7	SUSUT	TIGA	7200	10.90	21.84	882,352,941.18	534,224,272.44	228,940,550.87	59,554,270.40	822,719,093.70	36,764,705.88			36,764,705.88	1,741,837,000
8	SUSUT	SELAT	3709	2.92	35.29	882,352,941.18	275,199,698.12	61,330,863.17	96,219,659.04	432,750,220.33	36,764,705.88	175,000,000	211,764,705.88	1,526,868,000	
9	SUSUT	PENGIANGAN	3030	4.07	31.02	882,352,941.18	224,819,381.32	85,485,141.47	84,588,792.86	394,893,315.65	36,764,705.88			36,764,705.88	1,314,011,000
1	BANGLI	BUNUTIN	4164	4.74	30.45	882,352,941.18	308,959,704.23	99,557,634.05	83,025,716.40	491,543,054.68	36,764,705.88			36,764,705.88	1,410,661,000
2	BANGLI	TAMANBALI	7217	6.57	30.53	882,352,941.18	535,485,635.30	137,994,442.13	83,243,868.54	756,723,945.97	36,764,705.88	225,000,000	261,764,705.88	1,900,842,000	
3	BANGLI	KAYUBIHI	5730	9.46	25.36	882,352,941.18	425,153,483.48	198,695,193.69	69,149,193.59	692,997,870.76	36,764,705.88			36,764,705.88	1,612,116,000
4	BANGLI	PENGOTAN	4072	7.67	29.14	882,352,941.18	302,133,505.19	161,098,534.42	79,456,320.29	542,688,359.90	36,764,705.88			36,764,705.88	1,461,806,000
5	BANGLI	LANDIH	4151	8.46	37.52	882,352,941.18	307,995,132.62	177,691,473.42	102,309,305.05	587,995,911.10	36,764,705.88			36,764,705.88	1,507,114,000
1	TEMBUKU	JEHEM	8781	9.00	28.85	882,352,941.18	651,531,018.93	189,033,482.37	78,667,243.31	919,231,744.61	36,764,705.88			36,764,705.88	1,838,349,000
2	TEMBUKU	TEMBUKU	5682	4.50	26.35	882,352,941.18	421,591,988.33	94,546,944.53	71,849,934.57	587,988,867.44	36,764,705.88			36,764,705.88	1,507,107,000
3	TEMBUKU	YANGAPI	10067	14.32	21.61	882,352,941.18	746,949,409.81	300,773,274.17	58,930,118.96	1,106,652,802.94	36,764,705.88			36,764,705.88	2,025,770,000
4	TEMBUKU	UNDISAN	4556	3.00	24.61	882,352,941.18	338,045,247.95	63,011,160.79	67,112,536.25	468,168,944.99	36,764,705.88			36,764,705.88	1,387,287,000
5	TEMBUKU	BANGBANG	5491	4.00	26.49	882,352,941.18	407,420,205.55	84,014,881.05	72,237,363.73	563,672,450.34	36,764,705.88			36,764,705.88	1,482,790,000
6	TEMBUKU	PENINJOAN	11333	12.00	29.63	882,352,941.18	840,883,844.38	252,044,643.16	80,789,883.32	1,173,718,370.86	36,764,705.88			36,764,705.88	2,092,836,000
1	KINTAMANI	MENGANI	1069	4.27	58.60	882,352,941.18	79,317,464.89	89,685,885.52	159,777,503.16	328,780,853.58	36,764,705.88			36,764,705.88	1,247,899,000
2	KINTAMANI	BINYAN	372	1.48	51.82	882,352,941.18	27,601,587.41	31,085,505.99	141,279,793.32	199,966,886.72	36,764,705.88			36,764,705.88	1,119,085,000
3	KINTAMANI	ULIAN	964	3.53	54.16	882,352,941.18	71,526,694.25	74,143,132.53	147,653,553.50	293,323,380.28	36,764,705.88			36,764,705.88	1,212,441,000
4	KINTAMANI	BUNUTIN	1026	2.58	42.19	882,352,941.18	76,126,958.82	54,189,598.28	115,024,369.24	245,340,926.34	36,764,705.88	250,000,000	286,764,705.88	1,414,459,000	
5	KINTAMANI	LANGGAHAN	1232	3.71	53.66	882,352,941.18	91,411,708.84	77,923,802.18	146,311,617.41	315,647,128.43	36,764,705.88			36,764,705.88	1,234,765,000
6	KINTAMANI	LEMBEAN	773	3.30	44.47	882,352,941.18	57,354,911.47	69,312,276.87	121,259,514.52	247,926,702.86	36,764,705.88			36,764,705.88	1,167,044,000
7	KINTAMANI	MANIKLIYU	1762	5.03	37.94	882,352,941.18	130,736,551.12	105,648,712.92	103,433,587.95	339,818,851.99	36,764,705.88	250,000,000	286,764,705.88	1,508,936,000	
8	KINTAMANI	BAYUNG CERIK	1195	4.01	41.67	882,352,941.18	88,666,389.66	84,224,918.25	113,625,563.96	286,516,871.88	36,764,705.88			36,764,705.88	1,205,635,000
9	KINTAMANI	MANGGUH	806	2.13	45.43	882,352,941.18	59,803,439.39	44,737,924.16	123,851,782.00	228,393,145.55	36,764,705.88			36,764,705.88	1,147,511,000
10	KINTAMANI	BELANGAN	2231	9.73	36.42	882,352,941.18	165,535,326.64	204,366,198.16	99,308,052.76	469,209,577.56	36,764,705.88			36,764,705.88	1,388,327,000
11	KINTAMANI	KATUNG	1804	2.80	38.28	882,352,941.18	133,852,859.37	58,810,416.74	104,381,883.93	297,045,160.03	36,764,705.88			36,764,705.88	1,216,163,000
12	KINTAMANI	BANUA	698	2.45	48.89	882,352,941.18	51,790,075.30	51,459,114.64	133,286,951.80	236,536,141.74	36,764,705.88			36,764,705.88	1,155,654,000
13	KINTAMANI	ABUAN	1757	3.26	52.08	882,352,941.18	130,365,562.04	68,472,128.06	142,001,779.50	340,839,469.59	36,764,705.88			36,764,705.88	1,259,957,000
14	KINTAMANI	BONYOH	1299	4.33	37.56	882,352,941.18	96,382,962.49	90,946,108.74	289,722,919.36	36,764,705.88	36,764,705.88			36,764,705.88	1,208,841,000
15	KINTAMANI	SEKAAN	2022	2.53	36.90	882,352,941.18	150,027,983.18	53,139,412.27	100,609,890.32	303,777,285.76	36,764,705.88	150,000,000	186,764,705.88	1,372,895,000	
16	KINTAMANI	BAYUNG GEDE	2346	10.24	38.08	882,352,941.18	174,068,075.44	215,078,095.49	103,816,930.10	492,963,101.03	36,764,705.88			36,764,705.88	1,412,081,000
17	KINTAMANI	SEKARDADI	1937	8.40	44.75	882,352,941.18	143,721,168.85	176,431,250.21	122,005,870.09	442,158,289.15	36,764,705.88	150,000,000	186,764,705.88	1,511,276,000	
18	KINTAMANI	KEDISAN	2078	11.75	28.97	882,352,941.18	154,183,060.85	246,937,713.09	78,990,553.54	479,967,327.48	36,764,705.88	225,000,000	261,764,705.88	1,624,085,000	
19	KINTAMANI	BUAHAN	2007	14.23	39.04	882,352,941.18	148,915,015.94	298,882,939.34	106,455,299.84	554,253,255.12	36,764,705.88	225,000,000	261,764,705.88	1,698,371,000	
20	KINTAMANI	ABANGSONGAN	1347	14.33	42.76	882,352,941.18	99,944,457.64	300,983,311.37	116,571,353.93	517,499,122.94	36,764,705.88			36,764,705.88	1,436,617,000
21	KINTAMANI	SUTER	2121	12.56	29.85	882,352,941.18	157,373,566.92	263,806,726.50	81,385,349.33	502,565,642.75	36,764,705.88			36,764,705.88	1,421,683,000
22	KINTAMANI	ABANG BATUDINDING	3026	7.08	39.35	882,352,941.18	224,522,590.05	148,706,339.46	107,286,441.15	480,515,370.67	36,764,705.88			36,764,705.88	1,399,633,000
23	KINTAMANI	TERUNYAN	3257	19.63	41.51	882,352,941.18	241,662,285.46	412,303,028.76	113,174,828.37	767,140,142.59	36,764,705.88			36,764,705.88	1,686,258,000
24	KINTAMANI	SONGAN A	7763	17.01	32.58	882,352,941.18	575,997,642.63	357,273,281.67	88,839,553.13	1,022,110,477.44	36,764,705.88			36,764,705.88	1,941,228,000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	IKG	ADDM	BOBOT (0,5,0,3 dan 0,2) Rp.			35,000,000,000.00	ADDK			5,000,000,000.00	JUMLAH ADD/DESA
							17,500,000,000.00	10,500,000,000.00	7,000,000,000.00		ADDP	ADDKM	ADDKP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
25	KINTAMANI	SONGAN B	11598	11.88	36.08	882,352,941.18	860,546,265.52	249,524,196.72	98,361,482.66	1,208,431,944.90	36,764,705.88		36,764,705.88	2,127,550,000	
26	KINTAMANI	BATUR SELATAN	6801	13.86	32.58	882,352,941.18	504,619,344.01	291,111,562.84	88,824,039.39	884,554,946.24	36,764,705.88		36,764,705.88	1,803,673,000	
27	KINTAMANI	BATUR TENGAH	3539	4.74	29.40	882,352,941.18	262,586,069.47	99,557,634.05	80,154,591.44	442,298,294.95	36,764,705.88		36,764,705.88	1,361,416,000	
28	KINTAMANI	BATUR UTARA	1911	3.36	38.94	882,352,941.18	141,792,025.64	70,572,500.08	106,166,978.69	318,531,504.41	36,764,705.88		36,764,705.88	1,237,649,000	
29	KINTAMANI	KINTAMANI	7515	15.13	25.91	882,352,941.18	557,596,584.36	317,786,287.58	70,635,246.63	946,018,118.56	36,764,705.88		36,764,705.88	1,865,136,000	
30	KINTAMANI	SERAI	1172	5.38	43.93	882,352,941.18	86,959,839.90	113,000,015.01	119,763,089.91	319,722,944.82	36,764,705.88		36,764,705.88	1,238,841,000	
31	KINTAMANI	DAUP	761	2.69	45.89	882,352,941.18	56,464,537.68	56,500,007.51	125,105,717.81	238,070,263.00	36,764,705.88		36,764,705.88	1,157,188,000	
32	KINTAMANI	AWAN	1381	5.34	38.73	882,352,941.18	102,467,183.37	112,159,866.20	105,584,024.55	320,211,074.12	36,764,705.88		36,764,705.88	1,239,329,000	
33	KINTAMANI	GUNUNGBAU	666	1.95	45.38	882,352,941.18	49,415,745.20	40,957,254.51	123,740,751.04	214,113,750.75	36,764,705.88		36,764,705.88	1,133,231,000	
34	KINTAMANI	BELANGA	616	2.82	42.96	882,352,941.18	45,705,854.42	59,230,491.14	117,142,022.49	222,078,368.05	36,764,705.88		36,764,705.88	1,141,196,000	
35	KINTAMANI	BATUKAANG	669	1.92	42.69	882,352,941.18	49,638,338.65	40,327,142.90	116,388,242.68	206,353,724.24	36,764,705.88		36,764,705.88	1,125,471,000	
36	KINTAMANI	BELANTIH	3010	9.06	36.73	882,352,941.18	223,335,425.01	190,293,705.58	100,151,654.15	513,780,784.73	36,764,705.88		36,764,705.88	1,432,898,000	
37	KINTAMANI	CATUR	2165	7.56	35.72	882,352,941.18	160,638,270.81	158,788,125.19	97,399,878.67	416,826,274.67	36,764,705.88	225,000,000	261,764,705.88	1,560,944,000	
38	KINTAMANI	PENGEJARAN	860	4.11	43.82	882,352,941.18	63,810,121.43	86,325,290.28	119,482,193.00	269,617,604.71	36,764,705.88		36,764,705.88	1,188,735,000	
39	KINTAMANI	SELULUNG	2736	5.91	48.25	882,352,941.18	203,005,223.53	124,131,986.75	131,561,223.69	458,698,433.97	36,764,705.88		36,764,705.88	1,377,816,000	
40	KINTAMANI	SATRA	5073	11.63	40.07	882,352,941.18	376,405,518.62	244,273,266.66	109,257,537.24	729,936,322.52	36,764,705.88		36,764,705.88	1,649,054,000	
41	KINTAMANI	DAUSA	3398	6.28	31.71	882,352,941.18	252,124,177.46	131,903,363.25	86,467,760.77	470,495,301.48	36,764,705.88	175,000,000	211,764,705.88	1,564,613,000	
42	KINTAMANI	BANTANG	1878	9.80	38.40	882,352,941.18	139,343,497.73	205,836,458.58	104,701,633.36	449,881,589.66	36,764,705.88		36,764,705.88	1,368,999,000	
43	KINTAMANI	SUKAWANA	6610	33.61	43.15	882,352,941.18	490,447,561.22	705,935,038.04	117,649,589.10	1,314,032,188.36	36,764,705.88	225,000,000	261,764,705.88	2,458,150,000	
44	KINTAMANI	KUTUH	1612	4.11	40.23	882,352,941.18	119,606,878.77	86,325,290.28	109,699,937.95	315,632,107.00	36,764,705.88		36,764,705.88	1,234,750,000	
45	KINTAMANI	SUBAYA	1357	4.04	45.58	882,352,941.18	100,686,435.79	84,855,029.86	124,282,873.21	309,824,338.87	36,764,705.88		36,764,705.88	1,228,942,000	
46	KINTAMANI	SIAKIN	2268	8.84	43.86	882,352,941.18	168,280,645.82	185,672,887.12	119,583,836.64	473,537,369.59	36,764,705.88		36,764,705.88	1,392,655,000	
47	KINTAMANI	PINGGAN	2282	16.51	43.43	882,352,941.18	169,319,415.24	346,771,421.54	118,423,694.91	634,514,531.69	36,764,705.88		36,764,705.88	1,553,632,000	
48	KINTAMANI	BELANDANGAN	1142	6.00	41.24	882,352,941.18	84,733,905.43	126,022,321.58	112,432,374.41	323,188,601.42	36,764,705.88		36,764,705.88	1,242,302,000	
JUMLAH TOTAL KAB. BANGLI			235,856.00	499.91	2,567.40	60,000,000,000.00	17,500,000,000.00	10,500,000,000.00	7,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	5,000,000,000.00	100,000,000,000	

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

